

BAB VI

PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada Bab V, maka penulis menyimpulkan terkait Implementasi Program Pemberdayaan Pertanian Pada Gapoktan Nirwana Di Kelurahan Detusoko Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende.

1) Komunikasi

- a. Kejelasan program sejauh ini kurang lebihnya berjalan baik. Dalam hal ini, terlihat bahwa, program itu semakin jelas dikarenakan model perumusan programnya bottom-up dimana kelompok sasaran juga dilibatkan dalam perumusan program/ kegiatan sehingga mereka paham dan terlibat dalam pelaksanaan program. Dan juga didukung dengan sasaran kegiatan yang tepat serta kegiatan penyuluhan yang dibutuhkan oleh kelompok tani.
- b. Terkait dengan sosialisasi program sudah dilakukan dengan optimal. Menurut analisis peneliti hal ini dibuktikan karena adanya pemahaman dari kelompok tani .Hal lainnya yang mendukung sosialisasi program berjalan dengan optimal adalah karena adanya kesediaan dari tim PPL dalam memberikan sosialisasi tambahan (diluar waktu sosialisasi) jika dibutuhkan. Hal ini tentunya akan membantu memperlancar program.

2) Sumber Daya

- a. Insentif/dana sudah berjalan dengan baik dalam mendukung implementor untuk menjalankan tugasnya. Menurut analisis peneliti bahwa dengan pemberian insentif sesuai golongan maka akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi para penyuluh. Namun disisi lain kurangnya dana pada pelaksanaan program pada Tahun 2018 juga dirasa tidak optimal sehingga kurang mendukung pengadaan fasilitas bagi penyuluh dan kelompok sasaran
- b. Terkait fasilitas belum dilakukan secara optimal. Menurut analisis peneliti bahwa perlu adanya perbaikan dalam pengadaan fasilitas ini, karena kurangnya fasilitas yang ada dapat mengakibatkan terhambatnya program ini.

3) Disposisi

- a. Pengangkatan birokrasi sebagai tim penyuluh sudah berjalan cukup optimal. Menurut peneliti dengan adanya pengangkatan birokrasi ini maka ilmu yang didapatkan oleh kelompok tani memuaskan. Namun disisi lain jumlah penyuluh tidak sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah kerja. Tentunya hal ini juga secara tidak langsung akan menghambat optimalisasi kerja penyuluh.
- b. Staff pelaksana sudah tergolong baik, dalam artian bahwa staff/penyuluh yang ada sudah memberikan pelayanan yang baik, penyuluh bersedia menambahkan waktu sosialisai jika dibutuhkan, dan selalu dengan sabar

dalam membina kelompok tani, penyuluh juga ramah terhadap ketua kelompok dan anggota kelompok tani, tetapi menurut analisis peneliti perlu diperhatikan lagi mengenai jumlah staff pelaksana kalau bisa ditambah karena kurangnya staff pelaksana juga bias memicu terhambatnya program.

4) Struktur Birokrasi

a prosedur kerja dan ukuran dasarnya sudah berjalan optimal, karena dikerjakan berdasarkan panduan yang ada yakni RKTP. Mengenai perumusan program sebaiknya ketujuh ketua kelompok tani juga ikut dilibatkan agar mereka tau secara jelas program yang akan dijalankan. Soal fasilitas belum berjalan dengan baik, hal ini akan berpengaruh pada jalannya program ini

5) Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan program yang dijalankan juga didukung dengan beberapa faktor diantaranya, kesediaan penyuluh melakukan penyuluhan diluar jam kerja. Penghargaan bagi implementor serta keterlibatan aktif penyuluh dan kelompok sasaran. Selain faktor pendukung, juga terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya fasilitas yang kurang memadai serta kurangnya jumlah penyuluh.

6.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1) Komunikasi

- a. Kepada tim penyuluh dan Dinas Pertanian untuk tetap mempertahankan konsistensi komunikasi agar seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan program mempunyai pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan program.
- b. Kepada kelompok tani agar terus membangun komunikasi yang optimal dengan pihak penyuluh agar bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi

2) Sumber Daya

- a. Kepada tim penyuluh dan Dinas Pertanian untuk juga selalu memperhatikan serta mempertahankan konsistensi dalam pemberian gaji kepada para petugas sehingga selalu termotivasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik yang dananya berasal dari gaji pegawai itu sendiri. Selain itu perlu juga diberikan insentif dalam hal ini uang transport selama fasilitas untuk penyuluh belum mencukupi.
- b. Kepada Dinas Pertanian untuk juga mengoptimalkan bantuan serta fasilitas yang dibutuhkan oleh kelompok tani sehingga tidak hanya pupuk saja yang diberikan juga pemberian teknologi pertanian yang mempermudah kerja kelompok tani

3) Disposisi

Kepada Dinas Pertanian untuk memperhatikan jumlah penyuluh yang masih kurang. Kiranya ditambahkan 2 penyuluh lagi agar 1 penyuluh bisa hanya melayani 1 desa dan bisa bekerja optimal.

4) Sturktur Birokrasi

Kepada Dinas Pertanian dan penyuluh untuk tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sehingga tidak menyimpang dari tanggung jawab yang dijalankan. Kepada Dinas Pertanian dan penyuluh perlu juga diperhatikan terkait keterlibatan ketua kelompok tani dalam setiap penyusunan prosedur, agar mereka dapat mengerti secara terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Ayuningtyas Harvita Yulian dan Sugeng Pmudji. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja, Indenpendensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 01 No .02
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014 Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Albdulsyani. 2012 Sosiologi : Sistematika Teori dan Terapan. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Moleong, Lexi 1995. Metode Penelitian Kualitatif Remaja Karya : Bandung
- Subarsono, 2006 Analisa Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Sugyono. 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&A.Bandung.Afabeta
- Trimono, 2006. Evaluasi Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta : UNS Press
- Wahab, Solihin, Abdul . 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Bumi Aksara : Jakarta
- Widjaja, A,W, 2003. Otonomi Desa Meupakan Otonomi Bulat dan Utuh. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Sumber jurnal

- Sofa, Ira Ferianti. 2015. Skripsi. Pemberdayaan ,Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Hasil Panen melalui Progran Kelompok tani Sumber Sari di Dusun Sumbersari Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Prodi Sosio;ogi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Diunduh dari

<https://www.google.com/search?q=proposal+pemberdayaan+pertanian+pada+kelompok+tani&aqs=chrome..69i57j33.38136j0j4&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> (Diakses tanggal 27 Februari 2019)

Bhimo, Johan Sukoco. 2012. Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Perpustakaan Kelurahan di Kelurahan Panularan Kota Surakarta. Prodi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Diunduh dari <https://digilib.uns.ac.id> (diakses pada tanggal 01 maret 2019)

Mandasari, Sutra. 2014. Skripsi : Hubungan Peran Kelompok Tani dengan Produktivitas Usahatani Benih Padi. Studi Kasus : Kelompok Tani Surya Bangkit di Desa Mandawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jakarta. Prodi Agribisnis. Fakultas Sains dan Teknologi . Unuversitas Islam Negri Syarif Hidayatullah . Jakarta. (diakses pada tanggal 03 maret 2019)

Sofa, Haida. 2015. Skripsi. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kelompok Tani di Dusun Gondang Desa Campurejo Kecamatan Treteb Kabupaten Tremanggung. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga : yogyakarta (diakses pada tanggal 06 maret 2019)

Undang-undang

UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Pemerintah

Permen Pertanian Nomor 67/Permentan/SM. 050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

SK Mentan No 41,KPTS/OT.210/1992 Tentan Pedoman Pembinaan Kelompok tani